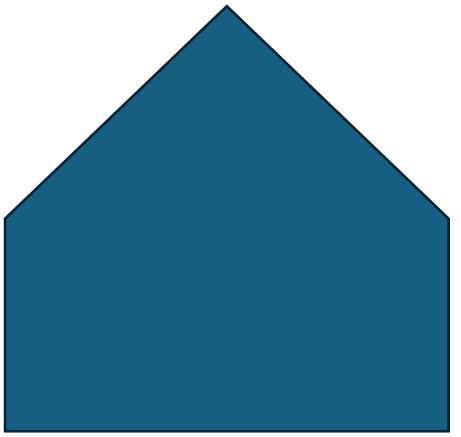
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



TAHUN ANGGARAN

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok telah dapat melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 serta menyusun laporan pelaksanaan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dalam memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok).

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2025 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan Visi - Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dan Visi - Misi Pemerintah Kabupaten Solok.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengevaluasi capaian dan efektifitas program dan kegiatan yang dilakukan serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamiin.

Arosuka, 17 Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP
Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok

Drs. ALIBER MULYADI
Nip. 19661226 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
IKHTISAR EKSEKUTIF 3
BAB I 4
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 5
1.2.2 Struktur Organisasi 5
1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi 8
BAB II 9
2.1. Perencanaan Strategis Organisasi 9
2.2. Perjanjian Kinerja 10
BAB III 12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 12
3.2 Realisasi Anggaran 38
PENUTUP 42
4.1. Kesimpulan 42
4.2. Saran 42

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil, perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**.**

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2025, wajib menyusun LkjIP setiap akhir tahunnya. Selain itu, informasi dalam dokumen LKJIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas yang telah diberikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur pendukung yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok melaksanakan 11 (sebelas) program, 20 (dua puluh) kegiatan, 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6. 295.409.806.- (Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perjanjian Kinerja.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023.

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok (sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah) merupakan unsur pendukung Bupati di bidang penanaman modal dan tenaga kerja.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang tenaga kerja;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

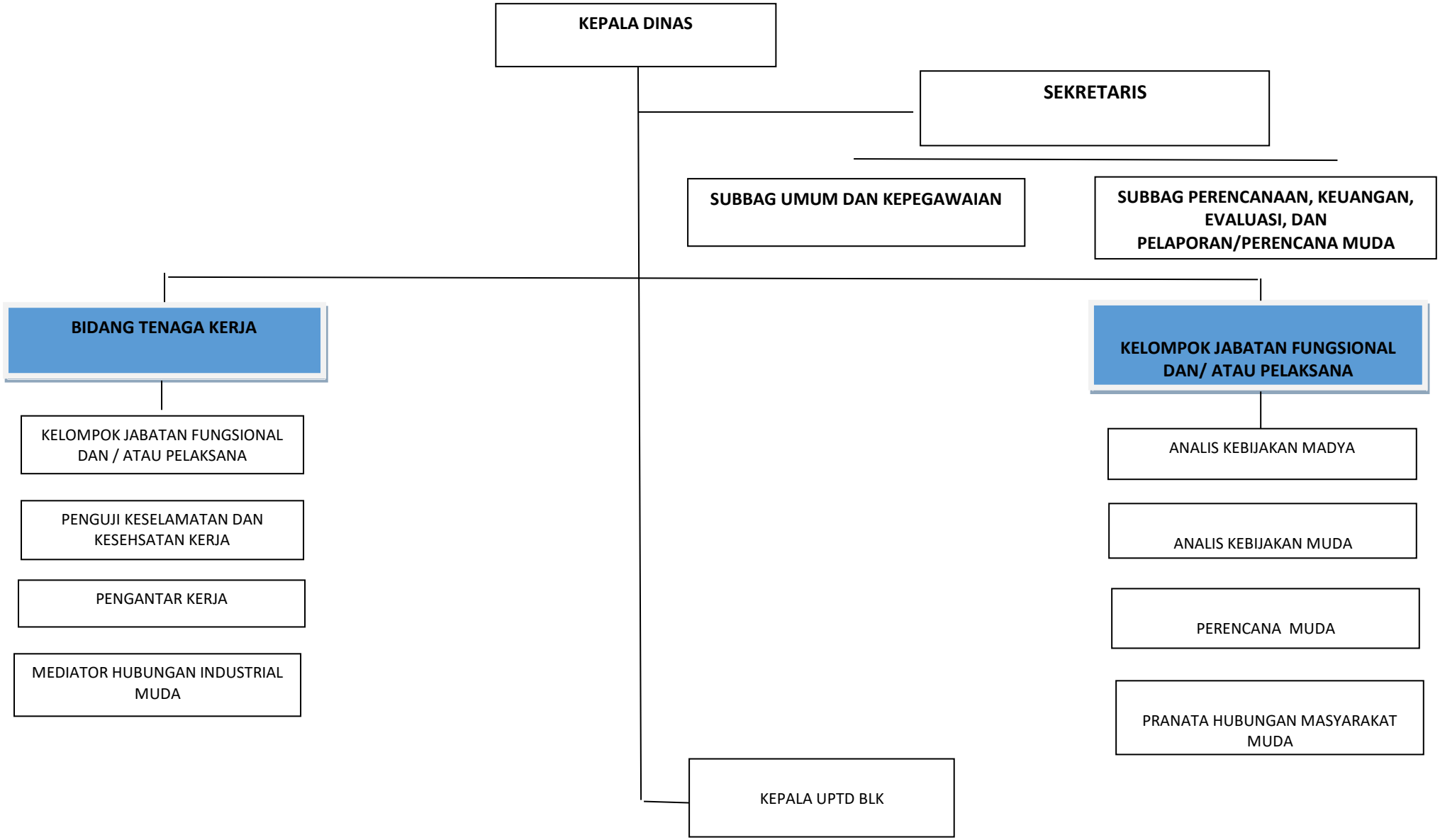
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2023, tentang Tata Kerja Kedudukan, Susunan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional, dan/atau Pelaksana (Perencana Muda);
3. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :
   a. Kepala Bidang
   b. Kelompok Fungsional

1). Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda;
2). Pengantar Kerja Muda; dan
3). Mediator Hubungan Industrial Muda.

4. Kelompok Jabatan Fungsional dan / atau Pelaksana, terdiri dari:
   a. Analis Kebijakan Madya;
   b. Analais Kebijakan Muda;
   c. Perencana Muda;
   d. Pranata Hubungan Masyarakat Muda
5. Kepala UPTD BLK

Berikut gambar struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok:



1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi yaitu :

1. Kualitas dan Kuantitas SDM yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan ketenagakerjaan. Ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan tekhnis aparatur dalam pelayanan penanaman modal dan ketenagakerjaan;
2. Dokumen informasi dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*DED, master plan, feasibility study, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai;
3. Pelaksanaan Penanaman Modal/investasi perlu direncanakan dan diawasi dengan memperhatikan SDG's termasuk di Kabupaten Solok. Pembangunan berkelanjutan Suistanable Development Goals, yaitu pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia baik generasi sekarang maupun yang akan datang tanpa mengekploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas adan daya dukung bumi;
4. Masih rendahnya capaian target investasi dikarenakan belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap investor/ perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Solok;
5. Minimnya penempatan tenaga kerja dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia. Ketersediaan Lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga lowongan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ada;
6. Belum berdayanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam mendorong peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja;
7. Lemahnya kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan aturan-aturan ketenagakerjaan dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja;
8. Masih kurangnya kompetensi/keahlian pencari kerja. Kompetensi yang dimiliki pencari kerja di Kabupaten Solok sangat minim, pencari kerja hanya mengandalkan atau hanya memiliki ijazah sekolah formal sedangkan untuk pencari kerja / pengalaman kerja pencari kerja tidak memiliki keahlian.
9. Kemampuan daya saing peserta pelatihan belum optimal sehingga diperlukan uji kompetensi dan pemagangan pada perusahaan-perusahaan yang sudah bekerjasama dengan UPT BLK serta rekruitment dan pemagangan instruktur sesuai kebutuhan.
10. Sarana dan prasarana BLK yang harus ditingkatkan dalam rangka persiapan akreditasi kejuruan, seperti peningkatan pembangunan gedung dan workshop BLK sebagai salah satu penunjang operasional pelatihan berbasis kompetensi.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021 – 2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis.

Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan nilai investasi melalui peningkatan pelayanan publik dan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok selama lima tahun ke depan akan mendorong meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah investor dan realisasi investasi. Di bidang tenaga kerja didorong agar meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja, meningkatnya pelatihan kerja, meningkatnya penempatan tenaga kerja dan meningkatnya hubungan industrial yang diharapkan dapat meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya nilai investasi;
3. Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja;
4. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja;
5. Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri;
6. Meningkatnya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
7. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Sasaran strategis tersebut memiliki 8 (delapan) indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2021-2026 secara lengkap sebagaimana terlampir, indikator sasaran tersebut juga merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program.

Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Di dalam kegiatan juga terkumpul sejumlah sub kegiatan. Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok, disusun mengacu pada Renstra dengan mengambil target tahun 2025.

Berikut matriks Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja 2021-2026:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.60
		Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi	Jumlah investor	19
			Nilai investasi (dalam milyar rupiah)	279.94
2	**Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	100
		Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	25
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	13
		Meningkatnya Hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja	Persentase perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	100

Sumber : Renstra DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2021- 2026

2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.55
2.	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi (dalam milyar rupiah)	264,94
3.	Meningkatnya Tingkat partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	77,00

Program		Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp. 5.539.069.937.-
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja	:	Rp 179.190.000.-
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	:	Rp 217.004.977.-
4. Program Penempatan Tenaga Kerja	:	Rp. 53.813.231.-
5. Program Hubungan Industrial	:	Rp. 73.619.766.-
6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	:	Rp. 59.867.025.-
7. Program Promosi Penanaman Modal	:	Rp. 34.702.405.-
8. Program Pelayanan Penanaman Modal	:	Rp. 334.484.043.-
9. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	:	Rp. 63.067.177.-
10. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	:	Rp 7.098.336.-
JUMLAH	:	**Rp. 6.561.916.897.-**

Sumber : Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kadis DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran *(output)*, sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dapat berupa keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)*.

a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

   Capaian Indikator Kinerja = Realisasi X 100%
   Rencana

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

   Capaian Indikator Kinerja = Rencana – (Realisasi-Rencana) X 100%
   Rencana

Kesimpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran sbb :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
b. 76% sampai 100% = Baik (B)
c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Kabupaten Solok sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2025 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	2	3	4	5		
1	**Meningkatkan pertumbuhan nilai investasi melalui peningkatan pelayanan publik**	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.65	3.57	
		Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi	Jumlah investor	16	19	
			Nilai investasi (dalam milyar rupiah)	264,94	535	
2	**Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	100	100	
		Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	24	217	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	12	126,71	
		Meningkatnya Hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja	Persentase perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	90	0	
Rata-Rata Capaian (%)						76.17

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

SASARAN 1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, DPMPTSPNAKER secara rutin melakukan survey untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang telah diberikan. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (**IKM**) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik. Melalui hasil survey ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada DPMPTSPNAKER di masa yang akan datang.

Adapun rumus IKM = $\frac{\text{Tot dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Tot unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$

Rumus NRR per unsur = $\frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$

Rumus NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan kepada masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.65	3.57	97.54

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dengan telah dilakukannya penilaian IKM di DPMPTSPNaker, dapat diketahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSPNAKER terutama dalam pemberian perizinan. Penilaian IKM yang ada digunakan sebagai bahan evaluasi bagi DPMPTSPNAKER guna lebih meningkatkan standar dan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat dinilai dengan cara melakukan survei terhadap 1.582 responden dengan hasil indeks tahun 2025 sebesar 3.57 atau 102.84%.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	% Cap Renstra
			2024	2025			
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.65	3.66	3.57	97.54	3.65	100,27

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dibandingkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Solok tahun sebelumnya, realisasi IKM tahun 2025 mengalami kenaikkan dari tahun sebelumnya, dibandingkan target akhir Renstra, realisasi tersebut sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan pada akhir Renstra.

Tabel 3.4

Perbandingan IKM dengan provinsi tahun 2025

Indikator	Realisasi (Indeks)	
	Kab Solok	Provinsi Sumbar
IKM	3.57	3,42

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok dan DPMPTSP Prov Sumbar tahun 2025

Jika dibandingkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat, IKM di Kabupaten Solok lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun kemungkinan penyebab lebih tingginya capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dikarenakan:

- Belum optimalnya mutu pelayanan yang ada, mulai dari sarana dan prasarana serta SDM yang ada.
- Aplikasi pelayanan perizinan yang belum sepenuhnya optimal sehinga membuat pelayanan agak sedikit terganggu.
- Fasilitas gedung yang belum memadai sehingga kenyamanan penerima layanan sedikit terpengaruh.

Adapun alternative solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

- Meningkatkan pelayanan perizinan melalui sistim Elektronik;
- Memberikan kemudahan birokrasi perizinan yang efisien;
- Peningkatan penyediaan sarana penunjang pelayanan publik seperti: komputer, display informasi, ruang menyusui dan ruang bermain anak yang lebih representatif;
- Ruang kerja pengolahan data dan dokumen yang lebih representatif.

Berikut pegawai yang melaksanakan urusan bidang perizinan guna mendukung capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat:

Tabel 3.5

Pegawai yang melaksanakan urusan bidang perizinan dan non perizinan

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1	Eka Trisna, SS	Analis Kebijakan Madya	Pembina, IV/a	
2	Roza Yulanda Syahril, SE	Analis Kebijakan Muda	Penata TkI/ III.d	

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Jabatan yang mengurusi bidang perizinan dan non perizinan yang pada awalnya berjumlah 3 (Tiga), 1 (satu) jabatan Fungsional Analis Kebijakan Madya dan 2 (dua) Analis Kebijakan Muda, dan terhitung 1 November 2024 jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda An. Yulindra SH, memasuki masa Purna Bhakti, sehingga saat ini yang mengurusi bidang perizinan dan non perizinan tinggal 2 (dua) jabatan Fungsional. Pada tahun 2025 Para Pejabat Fungsional tersebut dibantu oleh 5 (Lima) orang Tenaga PPPK Paruh Waktu untuk petugas Tenaga IT, Back Office dan Front Office pelayanan perizinan. Pada Tahun 2025,.

Tabel 3.6
Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Bidang Perizinan

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Kondisi Kelengkapan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Lemari Kaca	4	4			Mencukupi
2	Lemari Kayu	1	1			Mencukupi
2	Kursi Putar	12	12			Kurang
3	Meja Receptionist	4	4			Kurang
4	Komputer	4	4			Kurang
5	Kursi Rapat	20	20			Kurang
6	Bangku Tunggu	4	4			Kurang
7	Televisi	1	1			Mencukupi
8	Maket	7	7			Mencukupi

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2024

Kondisi sarana untuk mendukung pelayanan public untuk beberapa item masih kurang. Dengan telah dibangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP) di Koto Baru di tahun 2023, diperlukan penambahan sarana dan fasilitas penunjang yang mendukung penyelenggaraan MPP tersebut.

Ada 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran 1

Indikator Kinerja	Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Program pelayanan penanaman modal**	**346,719,043**	**271,551,886**	**78,32**
	Keg*.Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota*	346,719,043	271,551,886	78,32
	Sub Keg. Penyediaan Pelayanan Berusaha melalui Sistem Perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	265,005,507	198,440,917	74,88
	Sub Keg. Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	64,571,106	57,371,969	88,85
	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	17,142,430	15,739,000	91,81
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem	**7,098,336**		

	Informasi Penanaman Modal		**6,113,850**	**86,13**
	Keg. *Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kab/kota*	**7,098,336**	**6,113,850**	**86,13**
	Sub Keg. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	**7,098,336**	**6,113,850**	**86,13**

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Terdapat 3 sub kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan total anggaan Rp. **346,719,043,-** dengan realisasi Rp. **271,551,886,-** atau sebesar **78.52** %.

Kegiatan tekhnis yang dilakukan guna menunjang sasaran meningkatnya kualitas pelayanan berupa:

- Meningkatkan pelayanan perizinan melalui sistim Elektronik
- Memberikan sosialisasi/ bimbingan tekhnis simulasi applikasi OSS ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Solok
- Penyediaan tenaga ahli/programmer untuk penyempurnaan applikasi perizinan.
- Penambahan Tenaga Harian Lepas untuk membantu Pelayanan di MPP

Tabel 3.8

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

Sasaran	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Kinerja**			**Keuangan**			
			Target 2025	**Realisasi 2025**	**Capaian**	**Program**	**Pagu**	**Realisasi**	**Capaian**
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.65	3.57	97.54	Pelayanan Penanaman Modal	346,719,043	271,551,886	78,32
						Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**7,098,336**	**6,113,850**	80,72
Rata-rata capaian					97.54	Rata-rata capaian			**79,52**
Tingkat Efisiensi = 21,68 (20,48)									
Tingkat Efektifitas = 97.54									

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran ini sebesar **21,68**% dengan tingkat efektifitas **97.54**%

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):

- Memberikan kemudahan Perizinan;
- Mengoptimalkan Sosialisasi tentang pelayanan perizinan online;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
- Peningkatan penyediaan sarana penunjang pelayanan publik;
- Ruang kerja pengolahan data dan dokumen yang lebih representatif.

SASARAN 2. MENINGKATNYA JUMLAH INVESTOR DAN NILAI INVESTASI

Nilai Investasi adalah Investasi adalah akumulasi suatu bentuk aktiva (kekayaan) dengan harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Nilai Investasi dapat diukur dengan formulasi **Nilai investasi pada tahun n** (penambahan PMDN, penambahan PMA dan data investasi dari SIUP dan NIIB).

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Nilai Investasi dengan indikator kinerja Jumlah investor dan nilai investasi thn n (dalam milyar rupiah):

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi	Jumlah investor	Investor	19	115	605 %
	Nilai Investasi thn n	dalam milyar rupiah	279,24	389,661	139 %

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas, Pencapaian Kinerja Sasaran pada Tahun 2025, untuk realisasi kinerja sasaran mencapai dari target yang telah ditetapkan. Target investor yang ditetapkan yaitu 19 investor, ternyata pada tahun 2025 meningkat dengan realisasi sebesar 115 jumlah investor yang berinvestasi di kabupaten solok. Sedangkan untuk Realisasi Investasi dapat mencapai 389,661 Milyar rupiah, meningkat dari nilai investasi yang di targetkan sebesar 279,24 milyar.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		% Capaian Kinerja	Target Akhir 2026	% Cap Renstra
			2024	2025			
Jumlah investor	Investor	19	68	115	605 %	22	522 %
Nilai Investasi tahun n	Nilai (Dalam Milyar Rupiah)	279,24	777,163	389,661	139 %	293.2	132,89 %

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 490,332 milyar rupiah sementara tahun sebelumnya hanya 777,163 milyar rupiah.

Jumlah investor tahun 2025 juga mengalami peningkatan, dari 68 investor di tahun 2024 menjadi meningkat 847 investor pada tahun 2025. Realisasi jumlah investor tahun 2024 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 68 investor dari 16 investor yang ditargetkan. Investor baru tersebut menginvestasikan modalnya untuk 68 jenis usaha. Adapun investor tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Daftar Perusahaan/investor tahun 2025

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT USAHA
1	CAHAYA SEMBILAN MUDA	Jl. Solok Muaro-Kalaban KM. 04 Jorong Bungo Tanjung
2	HULIA MIGAS PRATAMA	Jalan Raya Selayo - Padang
3	PT.ANUGERAH EKA HARAPAN	Jalan padang muarolabuah, taluak dalam, alahan panjang

4	ONDRA WIRMAN	Jorong Talang Barat
5	KARYA USAHA ANEKA TAMBANG SOLOK SELATAN INDONESIA	Jorong Rawang Gadang Nagari Simpang Tanjung
6	PUSKESMAS SIMPANG TANJUNG NAN IV	Jalan Raya Padang Muara Labuh
7	CENTRATAMA MENARA INDONESIA	Jorong Atas Mesjid Nagari Batu Bajanjang
8	PUSKESMAS BATU BAJANJANG	Jorong Koto Tuo
9	FRENGKI AGUSNANDAR	Jorong Pasir
10	SARI ANISMA	TALANG SURIAN JORONG KUBANG DUO
11	PINUS MERAH ABADI	Jl Raya Solok KM 03, Kelurahan Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
12	NOVI HENDRA	JORONG BAWAH DUKU
13	NOFI HADI PUTRA	Jorong usak
14	UPT PUSKESMAS TALANG	Jalan Lintas Sumatera
15	MISWARTI	Jalan Alahan Panjang
16	WARNELIS	" AIR PANAS PINCURAN 7 "
17	AGUS FIRMAN	KANDIH JORONG SAWAH AMPANG
18	HAYU FITRAH	jorong sawah sudut
19	YAYAT SUPRIADI	jorong sawah sudut
20	LURAH GUMANTA	PT Lurah Gumanta Asam Jao Jorong Subarang
21	SYAFRINAL RENO PUTRA	JORONG LADANG PADI NAGARI SURIAN
22	ARPEX PRIMA DHAMOR	Jorong Binasi
23	HITAY DAYA ENERGY	Desa Batu Bajanjang
24	MITRA ARO PERSADA	Jorong Kayu Aro
25	IRAMA ZAMAN SEJAHTERA	Jalan Lintas Sumatera
26	PUSKESMAS ALAHAN PANJANG	" PUSKESMAS ALAHAN PANJANG" Jl. Diponegoro Jorong Alahan Panjang
27	PUSKESMAS TANJUNG BINGKUNG	"PUSKESMAS TANJUNG BINGKUNG" Jalan Lintas Solok Bukittinggi km 6 Tanjung Bingkung
28	PUSKESMAS SURIAN	Jl. Raya Padang- Muaralabuh KM 100 Pasar Surian
29	TOWER BERSAMA	Jorong Kayu Manang
30	PEGAWAI NEGERI GURU GURU SOLOK SELATAN	Jalan Lintas Sumatera
31	SUMATERA MITRA JAYABERSAMA	Jorong Tapak Kudo
32	RHATIH GA FERIANTI	Jln. Linkar Pintu Angin Jor. Linjuang Koto Tinggi
33	RUDI DESBRIAN	SIMPANG IV TALANG
34	RAWATAN JAYA GROUPS	Jorong Subarang
35	SUMISO ALAM RAYA	Jalan Rangkiang Luluih Samiso, Jorong Tanjuang Barisi
36	MONTIR OSMON	SIMPANG PAKAN AKEK
37	ZUL RAHMAN	Jorong Linawan
38	SIRTU AIR DINGIN	JORONG DATA

39	WESWI HERI YANTI	Jorong Mudik
40	ANDI VAKRI PUTRA	JORONG HALABAN PANYAKALAN KUBUNG. Panyakalan. Kubung. Kab. Solok. Sumatera Barat
41	PUNAKAWAN SUMATERA INTERNASIONAL	Sawah Luar Desa Pasilihan
42	KARYA ALBARRA SEJAHTERA	JALAN LINTAS SUMATERA KM 3 JORONG BUNGO TANJUNG
43	NIL EKA FITRI	Jalan Imam Bonjol Jorong Alahan Panjang
44	KAYU JAO MANDIRI	Jalan Lubuk Selasih - Alahan Panjang Km 05, RW.Kenagarian, Batang Barus, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27365
45	M. HIDAYAT	Sawah Ilie Jorong Bungo Tanjung
46	SUNWAY ALAHAN RESORT	Jorong Taluak Dalam
47	TALAGO DADOOK EXPRESS	JORONG TALAGO DADOK
48	LINGGA PURI MINING	Jorong Parak Tabu
49	CHAIRIYANTO	Jorong Galagah
50	FAJRIANSYAH	Tabek Rangguang Jorong Linjuang Koto Tinggi
51	LAKESIDE ALAHAN WISATA	Jl. Pasir Panjang Danau di Atas, Alahan Panjang
52	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	Desa Batang Barus
53	MUHAMAD NUR USMAN	Jorong Tanjung Barisi
54	ASHRAF PRATAMA TECHNOLOGY	Perumahan Nuansa Griya
55	ERISMAN	Jorong Batang Hari
56	REVI GUSRIVA	Jorong Taluak Dalam
57	HASTA KOBAR UTAMA	Jl Raya Koto Baru Jorong Simpang
58	LEPEN KENCANA UTAMA	Jl. Lintas Sumatera KM4
59	SURIANI	Jln Lintas Singkarak Padang Panjang
60	KAYRA RAYA GASINDO	KOMPLEK PERUMAHAN BUKIT CANGANG JALAN IMAM BONJOL ALAHAN PANJANG LEMBAH GUMANTI Kelurahan: Alahan Panjang Kecamatan: Lembah Gumanti Kab/Kota: Kab. Solok Provinsi: Sumatera Barat
61	RAWATAN JAYA GROUPS	HASANAH CITY RESIDENCE JL. DUSUN I JR. LUBUK SELASIH
62	VILLA KAYU ALPA	Jl Pasir Panjang, Galagah Alahan
63	CAHAYA ILAHI SEJAHTERA GAS	Jalan Lintas Sumatera
64	NOVEL SILGUSWAN	CUPAK
65	PESONA DANAU KEMBAR	JL LINGKAR DANAU DI ATAS JORONG GURUN DATA
66	MALENJANG TUJUH SEKAWAN	JL. Teuku Umar Jorong Alahan Panjang
67	NOFRI SURIADI	Jl. Raya Gajah Mada Alahan Panjang
68	ONION SARANA WISATA	JORONG GALAGAH

Sumber : DPMPTSPNakerKab Solok tahun 2024

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi nilai investasi dengan nasional dan provinsi tahun 2025

Tahun	Realisasi (Dalam Milyar Rupiah)	
	Kab Solok	Provinsi Sumbar
2025	389,661	19,060,742

Sumber : DPMPTSP Prop Sumbar dan DPMPTSPNakerKab Solok tahun 2025

Realisasi Investasi provinsi Sumatera Barat mencapai 5,16 Trilyun Rupiah dari target 4,75 Trilyun Rupiah yang ditetapkan. Sementara realisasi investasi Kabupaten Solok tahun 2023 sebesar 318,65. Realisasi investasi tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 96.14 Milyar Rupiah.

Tidak tercapainya capaian kinerja ini pada tahun 2024 sebagai berikut disebabkan:

- Kurangnya minat investor dalam menanamkan investasi di Kabupaten Solok karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang kemudahan dan peluang investasi di Kabupaten Solok.;
- Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Solok;
- Kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di kabupaten Solok sehingga data investasi semua perusahaan dapat terinventarisir dengan optimal;
- Kurangnya Konsolidasi maupun Sosialisasi antara pemerintah dengan dunia usaha dengan melibatkan dan mengikutsertakan stakeholder pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanaman Modal;
- Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait untuk melengkapi/kesempurnaan data potensi peluang Investasi sesuai sektor masing-masing;

Berikut pegawai yang melaksanakan urusan penanaman modal guna mendukung sasaran meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi:

Tabel 3.13

Pegawai yang melaksanakan urusan penanaman modal

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1	Refif Syofra, SE, MM	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM/Analis Kebijakan Madya	Penata Tk. I/ III.d	
2	Zulherius Esdey, SH	Kabid Pengendalian PM dan Sist.Informasi/Analis Kebijakan Madya	Pembina/IV.a	
3	Yuni Abdila, S Sos	Kasi Perencanaan Penanaman Modal/Perencana Muda	Penata Tk I/ IIId	
4	Masriwal, SE	Kasi Promosi dan Pemberdayaan Potensi Daerah/Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Penata Tk. I/ III.d	
5	Fenti Dwireza, SKM	Kasi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal/ Analis Kebijakan Muda	Penata/III.c	

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Jabatan struktural yang mengurusi bidang penanaman modal berjumlah pada awalnya berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 orang pejabat Fungsional Ahli Madya dan 3 (tiga) orang pejabat Fungsional Ahli Muda dan dibantu oleh 4 (empat) orang Tenaga Harian Lepas, 1 (satu) orang di bidang Perencanaan dan Pengembangan

Iklim Penanaman Modal dan 3 (tiga) orang di bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi. Pada akhir tahun 2024, ada 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal memasuki masa Purna Bakti.

Tabel 3.14 Sarana Prasarana Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Kondisi Kelengkapan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Lemari Kayu	1	1			Kurang
2	Kursi Putar	7	7			Kurang
3	Meja Kerja	12	10	2		Mencukupi
4	Komputer	2	2			Kurang
5	Kursi Rapat	20	17	3		Kurang
6	Printer	3	2	1		Kurang
7	Laptop	3	2	1		Cukup
8	Kursi tamu	2	2			Cukup
	Meja Pelayanan					

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Tabel 3.15
Program dan kegiatan yang menunjang sasaran 2

Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Jumlah Investor	**Program Promosi Penanaman Modal**	**37,074,405**	**34,523,286**	**93,12**
	Keg. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	37,074,405	34,523,286	93,12
	Sub Keg. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kab/kota	37,074,405	34,523,286	93,12
Nilai Investasi	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**56,495,025**	**40,002,043**	**70,86**
	Keg. *Penetapan pemberian fasilitas /insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota*	*2,240,085*	*2,101,230*	*93,80*
	Sub Keg. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	*2,240,085*	*2,101,230*	*93,80*
	Keg. *Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	*54,254,940*	*37,900,813*	*69,85*
	Sub Keg. Penyusunan Peta potensi dan peluang usaha kab/kota	*54,254,940*	*37,900,813*	*69,85*
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**63,067,177**	**58,535,218**	**92,81**
	Keg. *Pengendalian Pelaksanaan*	**63,067,177**	**58,535,218**	

	Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota			**92,81**
	Sub Keg Pengawasan Penanaman Modal	63,067,177	58,535,218	92,81
	Program Pelayanan Penanaman Modal	**346,719,043**	**271,551,886**	**78,32**
	Keg. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenagan Daerah Kabupaten/kota	**346,719,043**	**271,551,886**	**78,32**
	Sub Keg. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Elektronik	**265,005,507**	**198,440,917**	74,88
	Sub Keg. Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	**64,571,106**	**57,371,969**	88,85
	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	17,142,430	15,739,000	91,81

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Ada 4 (Empat) program, 5 (Lima) kegiatan dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya nilai investasi dengan total anggaran Rp 503,355,650,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan realisasi Rp. 404,612,433,- atau sebesar 80,38%.

Tabel 3.16

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Investor dan Nilai Investasi

Sasaran	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Kinerja**			**Keuangan**			
			Target 2025	**Real 2025**	**Capaian (%)**	**Program**	**Pagu**	**Realisasi**	**Capaian (%)**
Meningkatnya Jumlah Investor dan Nilai Investasi	Jumlah investor	Investor	19	115	605 %	Program Promosi Penanaman Modal	**37,074,405**	**34,523,286**	93,12
	Nilai Investasi tahun n	Dalam Milyar Rupiah	279,24	389,661	293,34%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**56,495,025**	**40,002,043**	**70,86**
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**63,067,177**	**58,535,218**	**92,81**
						Program Pelayanan Penanaman Modal	**346,719,043**	**271,551,886**	**78,32**
Rata-rata capaian					449,17 %				83,78
Tingkat Efisiensi = 16,22									
Tingkat Efektifitas = 449,17									

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran Meningkatnya Jumlah Investor dan Nilai Investasi sebesar **359,17**% dengan tingkat efektifitas **80.96**%.

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan jumlah investor dan nilai investasi:

- Melengkapi data potensi peluang Investasi sesuai sektor dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait sesuai yang dibutuhkan dunia usaha;
- Menciptakan Iklim usaha yang kondusif serta kemudahan berusaha bagi calon Investor;
- Memberikan kemudahan Perizinan, dengan pemberian insentif dsbnya dengan tujuan untuk menarik Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Solok;
- Pengembangan potensi daerah melalui strategi promosi yang inovatif dengan mengikuti promosi Investasi den potensi daerah melalui expo dan even-even yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta;
- Membuat Website promosi potensi peluang Investasi yang dapat diakses melalui media sosial;
- Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan/pelaku usaha di kabupaten Solok;
- Mengoptimalkan Sosialisasi terhadap pemanfaatan Lokasi Investasi kepada pemilik lahan, tokoh masyarakat setempat dengan melibatkan stakeholders pemangku kepentingan.
- Menyusun regulasi Penetapan pemberian fasilitas /insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota

SASARAN 3. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN TENAGA KERJA

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja:

Tabel 3.17
Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	% Kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	%	100	100	100%

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025:

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
4. Pemeliharaan dan Operasional Applikasi Informasi Pasar Kerja Online
5. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
6. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
7. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

8. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan-kegiatan tersebut masih mengacu kepada Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Solok Tahun 2018-2022 yang sudah habis masa berlakunya

.

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		% Capaian Kinerja	Target Akhir 2026	% Cap Renstra
			2024	2025			
% Kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	%	100	100	100	0	100	0

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2024

Pada tahun 2024 kegiatan yang dilakukan oleh bidang tenaga kerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja masih yang mangacu pada rancana tenaga kerja 100% .

Pada tahun 2024, pada APBD Perubahan dapat tambahan dana dalam rangka penyusunan Rencana Tenaga Daerah, Adapun Kegiatan yang mendukung dalam rangka penyusunan Rencana Tenaga Daerah tersebut :

- Konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
- Konsultasi ke Dinas yang membidangi Tenaga Kerja yang ada di Sumatera Barat yang baru menyusun RTKD

Tabel 3.19
Pegawai yang melaksanakan urusan bidang Tenaga Kerja

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1	Maifendri, S Kep	Kabid Ketenagakerjaan	Penata Tk I, III/d	

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2024

Yang mengisi jabatan pada Bidang Tenaga Kerja pada awalnya ada 4 (empat) 1 (satu) Jabatan Struktural dan 3 (tiga) jabatan Fungsional, pada bulan Mei 2024 1 (satu) jabatan fungsional Pengantar Kerja dapat Promosi jabatan dan pada bulan Juli 1 (satu) jabatan fungsional Keselamatan dan Kesehatan Kerja memasuki masa purna tugas, sehingga pada saat ini tinggal 2 (dua) jabatan yang mengurusi bidang tenaga kerja. Para Pejabat tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di pelayanan kartu kuning (AK1) dan petugas IPK OL (Informasi Pasar Kerja Online).

Ada 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung capaian persentase Kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20

Program dan kegiatan capaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja

No	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**% Kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja**	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**170,198,240**	**150,609,398**	88.49
		Keg.*Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro*	170,198,240	150,609,398	88.49
		Sub Keg. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	170,198,240	150,609,398	88.49

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Anggaran Program Perencanaan Tenaga Kerja, pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro, Pada Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp. 170,198,240 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 150,609,398. dengan sudah terbentuk nya Tim dan sudah terlaksanakan kegiatan dalam Penyusunan dokumen Rencana Tenaga Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 – 2030.

Tabel 3.21

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja			Keuangan			
			Target 2025	Real 2025	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	% Kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	%	100	100	100	Program Perencanaan Tenaga Kerja	170,198,240	150,609,398	88,49
Rata-rata capaian					0				88,49
Tingkat Efisiensi = 11,51									
Tingkat Efektifitas = 123,56									

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran 3 sebesar 80% dengan tingkat efektifitas 20,83%.

Adapun Rencana Tingkat Lanjut yang telah dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan persentase pencari kerja terlatih, antara lain:

- Terlaksananya penyusunan Rencana Tenaga Kerja daerah (RTKD) Kabupaten Solok tahun 2025-2029

SASARAN 4. MENINGKATNYA JUMLAH PENCARI KERJA YANG MENDAPAT PELATIHAN KERJA

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 4 Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja:

Tabel 3.22

Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	% pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	%	25	217	%

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2024

Realisasi indikator Kinerja persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja sudah melabihi dari target yang telah ditetapkan hanya sebesar 52,03% dari 23% target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena paket pelatihan hanya mengandalkan dana dari APBN dimana tahun 2024 hanya mendapat 16 (enam belas) paket pelatihan.

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		% Capaian Kinerja	Target Akhir 2026	% Cap Renstra
			2024	2025			
% pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	%	25	52,03	40,25	161 %	26	200,11

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dibandingkan tahun sebelumnya, persentase pencari kerja yang dilatih tahun 2025 mengalami peningkatan. Jumlah pencari kerja yang dilatih pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 256 orang sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 256 . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.24
Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja Kab Solok

Uraian	2024	2025	Ket
Jumlah Pencari Kerja Terlatih	256	217	Rumus: Jumlah Pencari Kerja Terlatih x 100% Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	492	539	
% Pencari Kerja Terlatih	52,03	40,25	

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Sasaran Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja ini merupakan pencapaian kinerja dari UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten Solok. BLK dikepalai Kepala UPTD yang dibantu Kasubbag Tata Usaha dan 6 Staf PNS serta 2 THL serta 7 (tujuh) orang instruktur. Untuk detailnya dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 3.25
Pegawai yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 4

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1	Zulya Ermawati, SH	Kepala UPTD BLK	Penata Tk. I/III.d	
2	Mulyawarni, S.Pd	Kasubbag TU BLK	Penata / III.c	
4	Rizal Khairal, S.Pd	Instruktur Ahli Madya	Pembina/IV a	
5	Edvi Junaidi, ST	Instruktur Ahli Madya	Pembina/IV a	
6	Nola Zuhana, M.Kom	Instruktur Ahli Madya	Pembina Tk 1/IV.b	
7	Ari Safbendri, ST	Instruktur Ahli Muda	Penata/III c	
8	Elviana Oktrismi, S.Pd	Instruktur Ahli Muda	Penata /III c	

9	Umi Qoriah, A.Md	Instruktur Pelaksana Lanjutan	Penata Muda/ III.a	
10	Fadly, Amd	Instruktur Pelaksana	Pengatur Tk 1/II d	
11	Edison	Fungsional Umum	Pengatur Tk 1/II d	
12	Afriliani, ST	Fungsional Umum	Penata Muda/ III.a	
13	Meliza Zulfia Candra, ST	Fungsional Umum	Penata Muda/ III.a	
14	Bakhtiar	Penjaga Keamanan Kantor	Pengatur Muda TK I/ II.b	
15	Hutri Nofrizal	Penjaga Keamanan Kantor	Pengatur Muda / II.a	

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Berikut daftar sarana dan prasarana yang mendukung capaian kinerja sasaran :

Tabel 3.26
Sarana dan Prasarana UPTD BLK

Jenis	Luas (m^2)	Kondisi	Thn Perolehan
Tanah di Komplek Perkantoran, Asrama, Workshop dan Perumahan Dinas di Lubuk Selasih	20.480	KuranBaik	1980
Gedung Kantor UPTD	84	Kurang Baik	
Garace	137	Kurang Baik	1987
Gudang Tertutup	77	Kurang Baik	1981
Workshop Elektro	63	Kurang Baik	1981
Workshop Listrik	35	Kurang Baik	1981
Workshop Automotive	105	Kurang Baik	1981
Workshop Bangunan	144	Kurang Baik	1981
Ruang menjahit	63	Kurang Baik	1981
Gedung Labor /Belajar	70	Kurang Baik	1987
Gedung Aula	176	Kurang Baik	1981
Gedung Teori/Belajar	126	Kurang Baik	1981
Mushalla	48	Kurang Baik	1987
Rumah Jaga	9	Kurang Baik	1987
5 (lima) unit Rumah Dinas type 70	350	Kurang Baik	1983
Rumah Dinas type 50 sebanyak 30 unit	1.500	Kurang Baik	1983
Asrama	500	Kurang Baik	1987
Ruang Komputer	88	Kurang Baik	1987
Ruang Serba Guna	90	Kurang Baik	1987
Ruang Komputer On-Line	60	Kurang Baik	2007
Meja			
Kursi			
laptop			
Komputer			
Printer			

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Ada 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung sasaran Persentase pencari kerja terlatih seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.27
Program dan kegiatan yang mendukung sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**% Pencari Kerja yang yang mendapatkan pelatihan kerja**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**184,662,237**	**163,976,016**	**88,80**
		Keg. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	*174,059,862*	*154,607,450*	*88,55*
		Sub Keg. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	*174,059,862*	*154,607,450*	*88,55*
		Keg. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*10,602,375*	*9,368,566*	*88,36*
		Sub Keg. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*10,602,375*	*9,368,566*	*88,36*

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Kegiatan tekhnis yang dilakukan untuk mendukung sasaran Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja:

- Sosialisasi dan Penyebaran informasi pelatihan ke nagari-nagari
- Monitoring alumni BLK

Tabel 3.28
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 4

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja			Keuangan			
			Target 2025	Real 2025	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	% pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	%	25	40.25	161 %	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	**184.662.237**	**163.976.016**	88.80
Tingkat Efisiensi = 11,2									
Tingkat Efektifitas = 161 %									

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran 4 sebesar 11,2 % dengan tingkat efektifitas 161%. Diharapkan di tahun berikut, dengan dukungan sumber daya yang ada dapat lebih memaksimalkan capaian kinerja.

Adapun Rencana Tingkat Lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan persentase pencari kerja terlatih, antara lain:

- Peningkatan sarana prasarana/SDM BLK;
- Peningkatan kompetensi siswa dan instruktur;
- Penambahan SDM fungsional instruktur di BLK;
- Meningkatkan kerjasama dengan BPVP dan BLK di luar Kabupaten Solok agar lebih banyak pemuda/pemudi kabupaten Solok yang dapat mengikuti pelatihan.

SASARAN 5. MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 5 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri dengan indikator kinerja Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan:

Tabel 3.29
Pencapaian Kinerja Sasaran 5

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri	% tenaga kerja yang ditempatkan	%	13	126,71	0 %

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Capaian kinerja untuk indikator sasaran penempatan tenaga kerja tidak mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,75% dari 12% target yang ditetapkan.

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		% Capaian Kinerja	Target Akhir 2026	% Cap Renstra
			2024	2025			
% tenaga kerja yang ditempatkan	%	13	8,61	126,71	0 %	26	33,57

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dibanding tahun 2024, realisasi capaian sasaran penempatan tenaga kerja mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024. Tahun 2024, realisasi mencapai 8,61% sementara tahun 2023 tercapai 3,58%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.31
Perbandingan Persentase Penempatan Tenaga Kerja Kab Solok
dan Propinsi Sumatera Barat

Uraian	Kab Solok		Prop Sumbar	Ket
	2024	2025	2025	
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	42	683	3.075	Rumus: Jumlah Pencari Kerja Yang ditempatkan x 100% / Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	488	539	13.102	
% Penempatan Tenaga Kerja	8,61	126,7	23,46	

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dilihat tabel diatas, persentase penempatan di Kabupaten Solok berada jauh dibawah dari persentase penempatan Provinsi Sumatera Barat. Untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Solok kedepan harus menambah jumlah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat.

Penyebab tidak tercapainya capaian kinerja sasaran meningkatnya Penempatan Tenaga Kerjadi dalam dan luar negeri antara lain disebabkan oleh:

- Kurangnya informasi lowongan kerja yang terakses oleh pencaker
- Banyak Pencaker yang terdaftar tidak melaporkan kembali, apakah sudah bekerja atau belum.

Hal-hal/solusi yang telah dilakukan untuk keberhasilan capaian kinerja:

- Meningkatkan penyebarluasan informasi lowongan kerja pada media-media yang bisa diakses oleh pencari kerja.
- Menyerankan kepada Pencari kerja terdaftar supaya mengupdate setiap 3 bulan perkembangan status pekerjaannya.

Berikut pegawai yang melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan guna mendukung capaian sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja:

Tabel 3.32
Pegawai yang melaksanakan urusan bidang Tenaga Kerja

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1	Maifendri, S Kep	Kabid Ketenagakerjaan	Penata Tk. I, III/d	

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2024

Jabatan struktural dan Fungsional yang disetarakan yang mengurusi bidang tenaga kerja berjumlah 2 (dua), yang dibantu oleh 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di pelayanan kartu kuning (AK1) dan petugas IPK OL (Informasi Pasar Kerja Online).

Ada 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yang mendukung capaian persentase penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.33
Program dan kegiatan capaian sasaran penempatan tenaga kerja

No	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**% Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**66,978,231**	**55,767,002**	**83,26**
		Keg. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	38,786,309	35,247,084	90,88
		Sub Keg. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	23,127,204	21,777,708	94,16
		Sub Keg. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	15,659,102	13,469,376	86,02
		Keg. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kab/Kota	28,191,925	20,519,918	72,79
		Sub Keg. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	28,191,925	20,519,918	72,79

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Kegiatan tekhnis yang dilakukan untuk mendukung sasaran Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri:

- Pelayanan kartu kuning (AK1) melalui aplikasi Sisfoizin dan pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP);
- Mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik;
- Pelayanan Perizinan dan rekomendasi passport bagi calon pekerja migran;
- Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Solok.

Tabel 3.34
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 5

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri	% tenaga kerja yang ditempatkan	%	13	126,71	974,6 %	Program Penempatan Tenaga Kerja	**66,978,231**	**55,767,002**	**83,26**
Tingkat Efisiensi = 16,74									
Tingkat Efektifitas = 974,6									

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran 5 sebesar 16,74 % dengan tingkat efektifitas 974,6 %.

Adapun Rencana Tingkat Lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan persentase penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, antara lain:

- Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja melalui event Job Fair dan Inkubasi bisnis;
- Peningkatan kompetensi pencari kerja yang sesuai dengan pasar kerja dalam maupun luar negri melalui kegiatan pemagangan;
- Peningkatan penyebarluasan informasi lowongan kerja melalui berbagai media informasi dan mobil pelayanan keliling;
- Pemberdayaan masyarakat/pencari kerja.

SASARAN 6. MENINGKATNYA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 6 Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Persentase Perselisihan yang terfasilitasi:

Tabel 3.35
Pencapaian Kinerja Sasaran 6

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja	% Perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	%	100	0	0%

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dilihat tabel diatas, persentase Perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan di Kabupaten Solok mencapai 0% dikarenakan tidak adanya perselisihan di perusahaan yang terjadi. Hal ini dapat terealisasi karena usaha preventif yang dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja dengan melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan.

Tabel 3.36

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		% Capaian Kinerja	Target Akhir 2026	% Cap Renstra
			2024	2025			
% Perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	%	100	0	0	0%	100	0

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dilihat tabel diatas, realisasi persentase Perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan di Kabupaten Solok pada tahun ini mencapai 0% dikarenakan tidak adanya perselisihan yang terjadi.

Penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran meningkatnya Hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja:

- Melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan terkait tata kelola yang layak di perusahaan.
- Melakukan Monitoring dan pembinaan ke perusahan perusahaan terkait penerapan Hubungan Industrial.

Berikut pegawai yang melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan guna mendukung capaian sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja:

Tabel 3.37

Pegawai yang melaksanakan urusan bidang Tenaga Kerja

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1	Maifendri, S Kep	Kabid Ketenagakerjaan	Penata Tk I, III/d	

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Jabatan struktural yang mengurusi bidang tenaga kerja berjumlah 1 (satu), yang ditambah dengan 1 (satu) pejabat fungsional tertentu serta dibantu oleh 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di pelayanan kartu kuning (AK1) dan petugas IPK OL tertentu(Informasi Pasar Kerja Online).

Ada 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung capaian persentase Perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.38
Program dan kegiatan capaian sasaran Meningkatnya Hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja

No	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	% Perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**71.184.766**	**60.055.925**	84.37
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah Kab/Kota	66.601.872	57.086.245	*90,82*
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	66.601.872	57.086.245	85.71
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah kabupaten/kota	*4.582.894*	*2.969.680*	64.80
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah kabupaten/kota	*4.582.894*	*2.969.680*	64.80

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Pada tahun Anggaran 2024, pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan,*t*erjadinya peningkatan anggaran disebabkan karena pada ada dana pokok fikiran anggota DPRD Kabupaten Solok, untuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja rentan sebanyak 400 orang, yang terealisasi sebanyak 390 orang.

Tabel 3.39
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 6

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja			Keuangan			
			Target 2025	Real 2025	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja	% Perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	%	100	0	0%	Program Hubungan Industrial	**71.184.766**	**60.055.925**	84.37
Tingkat Efisiensi = -96.68									
Tingkat Efektifitas = 0									

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran 6 sebesar -96,68% dengan tingkat efektifitas 0%.

Adapun Rencana Tingkat Lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan persentase Perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan, antara lain:

- Mengoptimalkan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.

SASARAN 7. MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 7 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Aparatur (IKA):

Tabel 3.40
Pencapaian Kinerja Sasaran 7

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks	2.6	2.65	101,92%

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2023

Dengan telah dilakukannya penilaian IKA di DPMPTSPNaker, dapat diketahui kepuasan aparatur terhadap pelayanan yang dilakukan oleh sekretariat DPMPTSPNAKER. Penilaian IKA yang ada digunakan sebagai bahan evaluasi bagi secretariat dinas guna lebih meningkatkan standar dan mutu pelayanan yang diberikan kepada para aparatur. Indeks Kepuasan Aparatur dinilai dengan cara melakukan survei terhadap 51 (lima puluh satu) responden yang merupakan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Non PNS di lingkup Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dengan hasil indeks tahun 2023 sebesar 2.65 atau 101,92%.

Tabel 3.41
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target Akhir 2026	% Cap Renstra
Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks	2.6	2.65	101,92%	2.7	98,14

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2023

Penyebaran angket guna mengukur Indeks Kepuasan Aparatur (IKA) baru dilakukan pada tahun 2022, sehingga tidak ada data pembanding tahun sebelumnya.

Penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran meningkatnya tata kelola organisasi:

- Mengoptimalkan sumber daya yang ada;
- Fasilitas gedung yang semakin baik sehingga menambah kenyamanan dalam melaksanakan tugas.

Berikut pegawai yang melaksanakan urusan kesekretariatan guna mendukung capaian sasaran meningkatnya tata kelola organisasi:

Tabel 3.42
Pegawai yang melaksanakan urusan kesekretariatan

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1	Hendrianto, SST, MPSSp	Sekretaris	Pembina/IVa	
2	Elvi Enita, SE, Msi	Fungsional Umum	Pembina Tk. I, IV/b	
3	Rifki Candra	Pranata Komputer Ahli Pratama	Penata Muda/III a	
4	Sita Fransisca	Fungsional Umum	Penata Muda Tk I/III b	

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2024

Jabatan Struktural yang mengurusi Sekretariat berjumlah 1 (satu), untuk mengisi jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian masih di pegang oleh Pelaksana Harian karena Jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian sudah purna bakti dan jabatan fungsional fungsional perencana, masih kosong, untuk membantu pekerjaan perencanaan dan keuangan masih diperbantukan,serta 2 (dua) orang Aparatur Sipil Negara, urusan sekretariat juga dibantu oleh 9 (sembilan) orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas sebagai tenaga administrasi (5 orang), petugas kebersihan (2 orang), petugas keamanan kantor (1 orang) dan tenaga sopir (2 orang).

Ada 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan dengan 15 (lima) sub kegiatan yang mendukung capaian Meningkatnya tata kelola organisasi dengan Indeks Kepuasan Aparatur (IKA) sebagai indikator kinerja secara rinci terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.43
Program dan kegiatan capaian sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi

No	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Aparatur	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.292.932.346**	**4.969.054.714**	**93,88**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.483.367	212.020.192	86,36
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.523.663	4.028.201	72,92
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	4.494.427	3.594.200	79,97
		Koord dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.329.199	78.328.254	93,99
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.136.078	125.889.537	82,74
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.636.224.757	3.445.963.732	94,76
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.628.385.623	3.438.318.066	94,76
		Koord dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.534.289	4.441.825	97,96
		Koord dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2.827.555	2.743.041	97,01
		Koord dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	477.290	460.800	96,54
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	721.346.349	663.127.006	91,92
		Penyediaan Komponen Instalasi	9.828.313	9.699.600	98,69

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	592.770.939	555.084.166	93,64
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.732.958	13.490.310	98,35
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.391.326	4.140.300	94,28
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	99.622.813	80.712.630	81,01
		Pengadaan Barang Milik daerah	116.818.925.50	104.647.320	89,58
		Pengadaan kendaraan dinas operational atau lapangan	2.000.000	1.500.000	75
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.818.925.50	104.647.320	89,58
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.500.000	75
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.018.925	101.347.320	89,67
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000	1.800.000	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.058.947,50	543.296.464	94.81
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas jabatan	196.234.897,72	187.242.604	95.42
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendraan Dinas Lapangan	12.642.200	6.041.150	47.79
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	356.591.849,78	343.014.710	96.19
		Pemeliharaan/rehab sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya Perlengkapan Gedung Kantor	7.590.000	6.998.000	92.20

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

Tabel 3.44
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 7

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2023	Real 2024	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks	2.65	2.66	100,37%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**5.103.353.609**	**4.893.853.406**	**95,89**
Tingkat Efisiensi = 4,11									
Tingkat Efektifitas = 104,59									

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran 7 sebesar 4,11% dengan tingkat efektifitas 104,59%.

Adapun Rencana Tingkat Lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan/ mningkatkan tata kelola organisasi, antara lain:

- Mengusulkan penambahan aparatur ke BKPSDM;
- Mengusulkan penyediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM;
- Mengusulkan anggaran peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor.

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran DPMPTSPNaker Kabupaten Solok pada tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 2025 berjumlah Rp **6.296.409.806,-** terealisasi Rp. **5.810.189.338,-** atau dengan penyerapan sebesar **92,28** %. Dengan 10 program, 21 kegiatan dan 40 sub kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 3.45 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.292.932.346**	**4.969.054.714**	**93,88**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.483.367	212.020.192	86,36
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.523.663	4.028.201	72,92
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4.494.427	3.594.200	79,97
3	Koord dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.329.199	78.328.254	93,99
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.136.078	125.889.537	82,74
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.636.224.757	3.445.963.732	94,76
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.628.385.623	3.438.318.066	94,76
6	Koord dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.534.289	4.441.825	97,96
7	Koord dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2.827.555	2.743.041	97,01
8	Koord dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	477.290	460.800	96,54
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	721.346.349	663.127.006	91,92
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.828.313	9.699.600	98,69
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	592.770.939	555.084.166	93,64
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.732.958	13.490.310	98,35
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.391.326	4.140.300	94,28
14	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	99.622.813	80.712.630	81,01
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.818.925.50	104.647.320	89,58
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.500.000	75
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.018.925	101.347.320	89,67
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000	1.800.000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.058.947,50	543.296.464	94.81
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	196.234.897,72	187.242.604	95.42

19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendraan Dinas Lapangan	12.642.200	6.041.150	47.79
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	356.591.849,78	343.014.710	96.19
21	Pemeliharaan/rehab sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya Perlengkapan Gedung Kantor	7.590.000	6.998.000	92.20
II	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	170.198.240	150.609.398	88.49
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	170.198.240	150.609.398	88.49
22	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	170.198.240	150.609.398	88.49
III	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**184.662.237**	**163.976.016**	88.80
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	174.059.0862	154.607.450	88.55
23	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	174.059.0862	154.607.450	88.55
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.602.375	9.368.566	88.36
24	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.602.375	9.368.566	88.36
IV	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**66.978.231**	**55.767.002**	83.26
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	38.786.306	35.247.084	90.88
25	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	23.127.204	21.777.708	94.16
26	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	15.659.102	13.469.376	86.02
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kab/Kota	28.191.925	20.519.918	72.79
27	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	28.191.925	20.519.918	72.79
V	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	71.184.766	60.055.925	84.37
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah Kab/Kota	66.601.872	57.086.245	85.71
28	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	66.601.872	57.086.245	85.71
	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten	*4.582.894*	*2.969.680*	64.80
29	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah kabupaten/kota	*4.582.894*	*2.969.680*	64.80
VI	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**346.719.043**	**271.551.886**	78.32
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	**346.719.043**	**271.551.886**	78.32

	secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota			
30	Penyediaan Pelayanan Terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	265.005.507	198.440.917	74.88
31	Pemantauan analisis evaluasi, pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	64.571.106	57.371.969	88.85
32	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	-	-	
33	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	17.142.430	15.739.000	91.81
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**7.098.336**	**6.113.850**	86.13
	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kab/kota	**7.098.336**	**6.113.850**	86.13
34	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	**7.098.336**	**6.113.850**	86.13
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**56.495.025**	**40.002.043**	70.86
	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	*2.0240.085*	*2.101.230*	93,80
35	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	*2.0240.085*	*2.101.230*	93,80
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*54.254.940*	*37.900.813*	69.86
36	Penyusunan Peta potensi dan investasi kab/kota	*54.254.940*	*37.900.813*	69.86
IX	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**37.074.405**	**34.523.286**	93.12
	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	*37.074.405*	*34.523.286*	93.12
37	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kab/kota	*37.074.405*	*34.523.286*	93.12
X	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**63.067.177**	**58.535.218**	92.81
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	**63.067.177**	**58.535.218**	92.81
38	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	-	-	-
39	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	-	-	-
40	Pengawasan penanaman modal	63.067.177	58.535.218	92.81
JUMLAH		**6.296.409.806**	**5.810.189.338**	**92,28**

Sumber : LRA DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2025

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok mempunyai tugas pokok tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok tahun 2024 dari 7 (tujuh) sasaran dengan 8 (delapan)) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSPNaker, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 4 indikator;
b. Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 2 indikator;
c. Capaian 56% sampai 75% (Cukup) : 1 indikator;
d. Kurang dari 55% : 1 indikator.

Sedangkan alokasi anggaran pembiayaaan program/ kegiatan untuk mewujudkan target kinerja dari APBD Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar **6.296.409.806,-** terealisasi Rp. . **5.810.189.338,-** atau dengan penyerapan sebesar **92,28** %

4.2Saran

Guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok, banyak hal yang perlu dilakukan antara lain :

- Memberikan kemudahan Perizinan;
- Mengoptimalkan Sosialisasi tentang pelayanan perizinan online;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
- Peningkatan penyediaan sarana penunjang pelayanan publik;
- Melengkapi data potensi peluang Investasi sesuai sektor dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait sesuai yang dibutuhkan dunia usaha;
- Menciptakan Iklim usaha yang kondusif serta kemudahan berusaha bagi calon Investor;
- Memberikan kemudahan Perizinan, dengan pemberian insentif dsbnya dengan tujuan untuk menarik Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Solok;
- Pengembangan potensi daerah melalui strategi promosi yang inovatif dengan mengikuti promosi Investasi den potensi daerah melalui expo dan even-even yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta;
- Membuat Website promosi potensi peluang Investasi yang dapat diakses melalui media sosial;
- Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan/pelaku usaha di kabupaten Solok;
- Mengoptimalkan Sosialisasi terhadap pemanfaatan Lokasi Investasi kepada pemilik lahan, tokoh masyarakat setempat dengan melibatkan stakeholders pemangku kepentingan

- Menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTK) Kabupaten Solok,tahun 2025 - 2030
- Melakukan sosialisasi ke perusahaan dalam rangka penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- Peningkatan sarana prasarana/SDM BLK;
- Peningkatan kompetensi siswa dan instruktur;
- Penambahan SDM fungsional instruktur di BLK;
- Meningkatkan kerjasama dengan BPVP dan BLK di luar Kabupaten Solok agar lebih banyak pemuda/pemudi kabupaten Solok yang dapat mengikuti pelatihan
- Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja melalui event Job Fair dan Inkubasi bisnis;
- Peningkatan kompetensi pencari kerja yang sesuai dengan pasar kerja dalam maupun luar negri melalui kegiatan pemagangan;
- Peningkatan penyebarluasan informasi lowongan kerja melalui berbagai media informasi dan mobil pelayanan keliling;
- Pemberdayaan masyarakat/pencari kerja
- Mengoptimalkan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial
- Mengusulkan penambahan aparatur ke BKPSDM;
- Mengusulkan penyediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM;
- Mengusulkan anggaran peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor

Arosuka, 26 Februari 2025
Kepala Dinas

Drs. ALIBER MULYADI
Nip. 19661226 199403 1 005